

**PENGARUH PENGETAHUAN PEMERINTAH DAERAH
TENTANG ANGGARAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP
PENYUSUNAN ANGGARAN DI KABUPATEN ENDE**

Oleh

- 1) Philipus Frederik Resi
Mahasiswa Program Studi Akuntansi
e-mail:
- 2) Hermanus Reo
Dosen Program Studi Akuntansi
e-mail: hermanreo1970@gmail.com
- 3) Falentina Lucia Banda
Dosen Program Studi Akuntansi
e-mail: mmyosep@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of knowledge of local government employees about budgets, knowledge of local government employees about community participation and knowledge of local government employees about transparency of public policies on budget preparation of the Regional Government of Ende Regency.

The population in this study were employees of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) and the Regional Financial and Asset Management Agency (SKPD) as budget compilers. The number of samples in this study amounted to 42 people. The sampling technique was carried out by means of a census technique and data was collected by distributing questionnaires to BAPPEDA employees and the Regional Financial and Asset Management Agency. The data before being analyzed has been tested for validity and reliability. Then the analysis was carried out using multiple linear regression analysis techniques with data processing using the SPSS 16 program.

Based on the research results, it shows that the knowledge of local government employees about the budget has a significant effect on budget preparation. Local government officials' knowledge of public participation has no effect on budget preparation. Meanwhile, the knowledge of local government officials about the transparency of public policies has a significant effect on the budgeting of the Ende District Government.

Keywords: Budget, Public Participation, Policy Transparency Public, Regional Government Budget Formulation

1. Pendahuluan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta negara (Dewi, 2009). Dalam sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses yang rumit, termasuk diantaranya Pemerintah Daerah. Anggaran sektor publik merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik atau anggaran sektor publik yang adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2005 dalam Oktariani, 2012). Dalam sektor publik, anggaran yang sering dikenal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah bertumpu pada tiga domain yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga domain tersebut harus bekerja secara sinergis, yang berarti setiap domain diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif. Dalam hal ini masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial dan ekonomi, termasuk mengajak kelompok – kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi (Syani, 2008). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006 dalam Gunawan, 2016).

Pemerintah Kabupaten Ende yang merupakan bagian dari pemerintahan nasional tentunya mempunyai kewajiban yang sama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam penyusunan APBD. Hal ini menjadi penting karena APBD merupakan penjabaran yang bersifat implementasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara konsekuen, maka diharapkan penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang paling penting proses penyusunan dalam setiap tahapan dapat pula meningkatkan pengetahuan pegawai pemerintah daerah, peningkatan terhadap partisipasi masyarakat serta transparansi

kebijakan publik. Selain itu, sumber daya dalam hal ini pegawai pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggaraan anggaran.

Rencana pemecahan masalah yang diambil yakni apakah pengetahuan pemerintah daerah tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan public berpengaruh terhadap penyusunan anggaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah pengetahuan pegawai tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap penyusunan anggaran.

2. Kajian Pustaka

2.1 Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2002) mendefinisikan anggaran merupakan pernyataan estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Menurut Nordiawan (2007) dan Mardiasmo (2002), fungsi anggaran yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaiia kerja, alat motivasi, dan alat untuk menciptakan ruang publik.

2.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Galbraith dalam Nor (2007) struktur organisasi yang terdesentralisasi diperlukan dalam kondisi administratif, tugas dan tanggungjawab yang semakin kompleks, yang selanjutnya memerlukan pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Partisipasi dapat diartikan sebagai pengaruh, pendelegasian prosedur–prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan. *Brownell* dalam Iskandar (2016) menjelaskan partisipasi sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja para individu dan menetapkan penghargaan atas dasar sasaran anggaran yang telah dicapai serta keterlibatan dan pengaruh para individu dalam penyusunan anggaran. Partisipasi yang baik membawa beberapa keuntungan :

- a. Memberi pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme.
- b. Memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu.

- c. Dapat meningkatkan kerja sama antara departemen.
- d. Para karyawan dapat lebih menyadari situasi dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain.

2.3 Pengetahuan Pegawai

Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Menurut Subagyo dalam Mangkunegara (2000:46), “Pengetahuan pegawai merupakan segala sesuatu yang mereka ketahui tentang obyek tertentu yang merupakan pengetahuan umum yang dilaksanakan secara langsung atau mempengaruhi pelaksanaan tugas pegawai”. Pengetahuan pegawai akan pelaksanaan tugasnya dengan baik sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas dengan baik.

2.4 Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan anggaran. Achmadi *et.al* (2007) dalam Dewi (2009) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

2.5 Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga – lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak – pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria :

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat.
- e. Tersedia sistem informasi kepada publik.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian survei. Lokasi penelitian pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende Pegawai BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Alat pengumpulan data yang diperlukan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Variabel dan Indikatornya:

1. Pengetahuan pegawai tentang anggaran
2. Pengetahuan pegawai tentang partisipasi masyarakat
3. Pengetahuan pegawai tentang transparansi kebijakan publik

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Uji Instrumen Penelitian

Data responden/pegawai dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan formal tertinggi, golongan kepangkatan, dan dibagikan kepada responden sebanyak 42 eksemplar. Kuesioner yang kembali 39 eksemplar dan sisanya tidak dikembalikan karena hilang.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig	Sig	Status
Unstandardized residual	0,436	0,991	p>0,05	Normal

Sumber data: data primer yang diolah, 2017

Dari tabel di atas, nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih besar dari α ($p>0,05$), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	t_{hitung}	Nilai sig	Sig	Interpretasi
PP Anggaran	-0.225	$\alpha > 0,05$	0,823	Bebas

				Heterokedastissitas
PP Partisipasi Masyarakat	-1.152	$\alpha > 0,05$	0,257	Bebas Heterokedastissitas
PP Transparansi Kebijakan Publik	2.107	$\alpha > 0,05$	0,420	Bebas Heterokedastissitas

Sumber data: Data primer yang diolah, 2017.

Dari hasil perhitungan, menunjukkan tidak ada gangguan heterokedastisitas, karena nilai signifikansi lebih besar dari α pada tingkat signifikansi 5% ($p > 0,05$), sehingga secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.3
Hasil Uji Variance Inflation Factor (VIF)

Nama Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PP Anggaran	0,783	1,277
PP Partisipasi Masyarakat	0,896	1,117
PP Transparansi Kebijakan Publik	0,859	1,164

Sumber data: Data primer yang diolah, 2017.

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga data bebas multikolinearitas, sehingga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.

Tabel 4.4
Hasil Uji F dan Adjusted R²

F _{hitung}	F _{tabel}	Adjusted R ²	Sig	Kesimpulan
26,184	2,87	0,665	0,000	Model Fit

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Nilai F_{hitung} model diatas sebesar 26,184 dan F_{tabel} 2,87 maka nilai F_{hitung} > F_{tabel} dengan probabilitas 0,000, maka dapat dikatakan bahwa model regresi sudah tepat (fit) dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel Penyusunan Anggaran.

Tabel 4.7
Hasil Uji T Regresi Berganda

Variabel	Koef Regresi	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Kesimpulan
Konstanta	- 1,074				
PP Anggaran	0,867	6,189	1,684	0,000	H1. Terdukung
PP Partisipasi Masyarakat	-0,128	-0,840	1,684	0,407	H2 Tidak Terdukung
PP Transparansi kebijakan Publik	0,620	3,476	1,684	0,001	H3. Terdukung
<i>Adjusted R² = 0,665</i>					

Sumber data: Data primer yang diolah 2017.

4.3 Hipotesis

a. Pengetahuan Pegawai tentang Anggaran

Dari uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t diketahui tingkat signifikan yang diperoleh sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga variabel pengetahuan pegawai tentang anggaran menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran. Pengetahuan pegawai tentang anggaran dalam memahami perencanaan anggaran, keterlibatan aktif dalam penyusunan anggaran, kemampuan pegawai dalam mendeteksi setiap kebocoran anggaran, kemampuan mendeteksi setiap pemborosan anggaran dan kemampuan melaksanakan setiap tugas dengan baik dapat meningkatkan penyusunan anggaran.

b. Pengetahuan Pegawai tentang Partisipasi Masyarakat

Dari uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t diketahui tingkat signifikan yang diperoleh sebesar $0,407 > \alpha = 0,05$ sehingga variabel pengetahuan pegawai tentang partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran. Hal ini bisa terjadi bahwa pegawai pemerintah dalam berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sepenuhnya berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki.

c. Pengetahuan Pegawai tentang Transparansi Kebijakan Publik

Dari uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t diketahui tingkat signifikan yang diperoleh sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$ sehingga variabel pengetahuan pegawai tentang transparansi kebijakan publik menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran. Penggunaan informasi pekerja yang relevan dapat meningkatkan kinerja.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh pengetahuan pegawai tentang anggaran terhadap penyusunan anggaran dengan tingkat signifikan yang diperoleh sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$.
2. Pengetahuan pegawai tentang partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran karena dari hasil uji t diketahui tingkat signifikan yang diperoleh sebesar $0,407 > \alpha = 0,05$ sehingga variabel pengetahuan pegawai tentang partisipasi masyarakat menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran.
3. Pengetahuan pegawai tentang transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap penyusunan anggaran karena tingkat signifikan yang diperoleh sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Nila (2009).

5.2 Saran

1. Lebih meningkatkan pengetahuan pegawai melalui kegiatan program pendidikan lanjutan di tingkat pendidikan formal.
2. Meningkatkan pengetahuan pegawai tentang partisipasi masyarakat dengan cara ikut terlibat secara lebih proaktif dalam setiap kegiatan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan).
3. Lebih meningkatkan transparansi kebijakan publik dengan cara mensosialisasikan berbagai rancangan penyusunan anggaran.

Daftar Pustaka

Dewi, N. K. (2009). *Pengaruh pengetahuan pegawai pemerintah daerah tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap*

partisipasi penyusunan anggaran (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

DAERAH, K. K. P. S. *KABUPATEN BARRU WORK ABILITY OF REGIONAL SECRETARIAT EMPLOYEES BARRU REGENCY* Anirwan.

Gunawan, D. R. (2016). *Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.

Iskandar, E. (2016). *Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Manajer Perusahaan BUMN di Kota Banda Aceh*. *Jemensri (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari)*, 1(1), 27-41.

Nila, 2009. *Pengaruh Pengetahuan Pegawai Pemerintah Daerah Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran*, Simposium Nasional Akuntansi XII.

Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Nomor, P. P. (58). Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Nor, Wahyudin. 2007. *Desentralisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial*, Simposium Nasional Akuntansi X: 1 – 27.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Oktariani, R. (2012). *Prosedur Penganggaran Partisipatif Pada Bappeda Kota Bandung*.

Syani, A. (2008). *Good Governance Dalam Era Otonomi Daerah*.